

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gorontalo Utara, adalah faktor eksternal yang meliputi adanya masyarakat yang kurang proaktif terhadap program PTSL dikarenakan belum optimalnya upaya sosialisasi dan penyuluhan PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional, banyaknya tanah dan kepemilikan tanah yang bermasalah, peraturan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih belum memadai dalam menampung permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PTSL, serta pemerintah desa yang kurang bersinergi dalam pelaksanaan PTSL.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Masa mendatang adalah pertama, dengan melakukan penataan institusi, meliputi pengoptimalan Petunjuk Teknis Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022, memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas lapangan, serta mengajukan penambahan sumber daya manusia di kementerian, khususnya terkait tenaga Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB). Kedua, dengan penanganan masalah di luar institusi, yang meliputi membangun kesadaran masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan, evaluasi terhadap peraturan/kebijakan PTSL, membangun spirit pemerintah desa, serta penanganan sengketa tanah dengan memaksimalkan panitia adjudikasi.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut :

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh *stakeholder* dari tataran antar kementerian hingga sampai elemen pemerintah paling bawah yakni pemerintah desa, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengintensifkan upaya sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya perlindungan hukum hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus melakukan evaluasi seluruh peraturan dan kebijakan terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebagai langkah menciptakan peraturan dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan hak atas tanah masyarakat secara efektif dan optimal.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana di tiap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota sebagai penunjang jalannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten/Kota.
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara menginginkan agar kiranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya terkait armada kendaraan dan sumber daya manusia yang terampil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A'an Efendi & Freddy Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi*, Cetakan Ke 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anton M. Moeliono dkk, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, 2015. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur unturnya*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Bachsani Mustafa, 2011. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bambang Sunggono, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Basuki Ismail, 2013, *Negara Hukum, Demokrasi, Toleransi*, Jakarta: Intermedia.
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan Ke 4, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Burhan Ashshofa, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dalimunthe, 2010, *Pelaksanaan Landreform Di Indonesia Dan Permasalahannya*, Medan: FH USU Press.
- Damang dan Apriyanto Nusa, 2017. *Asas Dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Darmawan Nugroho, 2017. *Tanah Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Setara Press.
- E. Fernando M. Manullang, 2017. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- I Nyoman Putu Budiarta, 2016. *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2018. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- L. J. Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Tahir Azhari, 2015, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Maria Alfons, 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Malang: Universitas Brawijaya.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Sidantha, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2013. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Muchsan, 2017. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin, dkk, 2014. *Hukum Agraria Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Paulus E. Lolutung, 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 2017. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Ke 12, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ratmono 2017, “*Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*”, *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

- Ronny Hanitijo Soemitro, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Raharjo, 2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2019. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Theo Huibers, 2012. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- _____, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Utrecht, 2012. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- _____, dan Moh. Saleh J Jindang, 2019. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan.
- Wahyu Sasongko, 2012. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: UNI Press.
- Wahyuni, 2017, *Konsep Berbagi Peta Untuk Peningkatan Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Percepatan Pendaftaran Tanah*, Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL Dan Respon Solusinya, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Dian Aries Mujiburohman, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)*, Jurnal Bhumi Vol. 4 No. 1, Mei 2018.
- Isdiyana Kusuma Ayu, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019.

Ismail, *Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat (Political Direction of Land Law And Protection of People's Land Ownership)* Jurnal RechtsVinding Volume 1 No. 1. 2012.

Laily Ratna, *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan, Volume 8 Nomor 1 Desember 2021.

Muhammad Syukur, dkk. *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah: Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2, No. 10, Oktober 2021.

Suyikati, 2019. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019,

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Ida Bagus Kumara Adi Adnyana, 2010, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan* Malang: Disertasi Program Doktor Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Diseluruh Wilayah Republik Indonesia

Internet :

Data Tersebut Diakses Dari Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, www.gorontaloutarakab.bps.go.id, diakses tanggal 05 Januari 2022, Pukul 11:43 Wita.

Dua Alasan Penting Mengapa Tanah Perlu Disertifikatkan, www.kompas.com, Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2022, Pukul 20:45 Wita.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, www.setkab.go.id diakses 24 September 2021, Pukul 09:40 Wita.

Permasalahan Lahan DI Indonesia Mengapa Sulit Diatasi, www.perkim.id, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2022, Pukul 16:30 Wita

Purbaya, *Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah*, www.news.detik.com, Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2022. Pukul 14:38 Wita